

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 9 Tahun 2015. Tentang pemerintahan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga pemerintahan pada umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Organisasi lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini. Sehingga berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh

pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.

Pelaksanaan dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan peningkatan ini berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan tinggi, maka daerah tidak perlu dana perimbangan. Untuk mempercepat pembangunan di daerah dana perimbangan masih sangat diperlukan.

Menurut Halim (2001:167) adalah ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu pertama kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahnya, dan yang kedua ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (APD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik yaitu melalui akuntabilitas kinerja. Sehingga tidak salah apabila siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban kepada publik. Jadi proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam dasar hukum dan aturan organisasi, akuntabilitas kinerja menjadi salah satu yang tercantum didalamnya. Karena organisasi diwajibkan

secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasi dengan kinerja yang diperoleh. Indra Bastian (hal:88) menjelaskan kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefisiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit dan pertanggungjawaban publik.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi kabupaten bekasi, yakni:

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (APD) yang relatif kecil dibanding pendapatan transfer.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
4. Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada kabupaten bekasi. Karena itu pemerintah kabupaten bekasi sebagai pihak yang diserahi tugas yang

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk dinilai apakah pemerintah kabupaten bekasi berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewangan-penyelewangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat resah dan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah kabupaten bekasi, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada pemerintah kabupaten bekasi. Sehingga masyarakat juga dapat membantu kinerja pemerintah kabupaten bekasi apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi adalah salah satu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten bekasi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “***Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Badan***

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi ”

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah politis jika membahas mengenai prioritas alokasi dan masalah ekonomi ketika berbicara sumber pendanaanya. Menganalisa keuangan di indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, yakni:

1. Pemerintah daerah yang masih bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (APD) yang relatif kecil dibanding pendapatan transfer sehingga kemampuan daerah untuk menggali potensu sumber-sumber pendapatan asli daerah masih rendah.
3. Rendahnya kemampuan penerimaan daerah dalam penegelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
4. usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
5. Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Dengan menggunakan analisis rasio keuangan menjadi tolak ukur peneliti untuk menilai atau perbandingan kinerja keuangan dari tahun per tahun, dimana akan menggambarkan kondisi keuangan badan pengelolaan keuangan kabupaten bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya

adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten bekasi jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten bekasi jika dilihat dari Rasio Efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten bekasi jika dilihat dari Rasio Efisiensi
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten bekasi jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten bekasi jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui, yaitu:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Keserasian.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan BPKD Kabupaten Bekasi ditinjau dari teori Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Bekasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran untuk Pemerintah Daerah dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dengan media pembelajaran dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

F. Kerangka Pemikiran

Menganalisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Bekasi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan BPKD Kabupaten Bekasi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Dibawah ini ada enam macam rasio yang

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKD Kabupaten Bekasi.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintahan daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

Rasio Efektivitas dan Efisiensi keuangan daerah, efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam perealisasi Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah tersebut. Apabila semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Rasio Efisiensi keuangan daerah menggambarkan dan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap tahun.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG